

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Ns.Kasiati. Ni Wayan Dwi Rosmalawati. 2016. *Kebutuhan Dasar Manusia I* Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta Selatan.

Richard Stanford & Rudi Febriamansyah. 2017. *Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Nelayan.Temuan dari Provinsi Sumatera Barat*. Andalas Universiti Press. Sumatera Barat.

Suharto. 2009. *Paradigma Baru Studi Kemiskinan*. Jakarta: Media Indonesia

Kiniki, Angelo & Robert, Kreitner. 2008. *Organizational Behavior*. USA: McGraw – Hill Irwin

Kusnadi, 2009, *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Husaini, Usman. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press: Jakarta.

Sugiyono. 2019. *Metodologi Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: CV Alfabeta.

Kotler P, Keller, Kevin L. 2003. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Gajdzik, P.K. 2005. *Relationship Between General Self Efficacy And Increasi Student*. USA. Harpercollins

Dunn, W. N., 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Kedua ed. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

### B. Jurnal

Subhani, W. dan H.R. Barus. 1998. *Alat Penangkapan Ikan dan Udang Laut di Indonesia*. Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.

I.S. Aji, S. M. Sapuan, E.S. Zainuddin, and K. Abdan.2009. *Serat Kenaf sebagai Penguat untuk kopolimer: A Review,*” vol. 4, nomor 3.

Setiawan Muhammad. 2014. *Analisis Sektor Ekonomi Basis Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kota Batu*. Malang: Jurnal Ilmiah

Habibi, A. 2015. *Alat Tangkap Trawl Ancam Keberlanjutan sumberdaya laut*. Jakarta.

Pramono.B. 2006. Strategi Pengelolaan Perikanan Jaring Arad yang Berbasis di Kota Tegal. Tesis. Sekolah Pascasarjana. Bogor. Institut Pertanian Bogor.

### C. Undang – Undang

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Tangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.PERMEN/30/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di wilayah Pengelolaan Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Penangkapan Perikanan Tangkap.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan.

Surat Edaran Nomor: 72/MEN-KP/II/2016, tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia (WPPNRI).

Surat Keputusan Menteri Pertanian (SK Mentan) Nomor 561/ Kpts / UM /11 / 1973: Peraturan Ini Berisi Tentang Pemanfaatan Ikan Hasil Samping.

Surat Keputusan Menteri Pertanian (SK Mentan) Nomor 40/ Kpts/ UM/ 11/ 1973: Berisi tentang perubahan (SK Mentan) Nomor 561/ Kpts / UM /11 / 1973.

Surat Keputusan Menteri Pertanian (SK Mentan) Nomor 01/ Kpts / UM /1 / 1975: Peraturan Ini Tentang Pembinaan Kelestarian Kekayaan Yang Terdapat Dalam Sumber Perikanan Indonesia

Surat Keputusan Menteri Pertanian (SK Mentan) Nomor 02/ Kpts / UM /11 / 1975: Peraturan Ini Tentang Pembinaan Kelestarian Kekayaan Yang Terdapat Dalam Sumber Perikanan Indonesi di Irian Jaya.

Surat Keputusan Menteri Pertanian (SK Mentan) Nomor 317/ Kpts / UM /7 / 1975: Peraturan Ini Tentang Pembinaan Kelestarian Kekayaan Yang Terdapat Dalam Sumber Perikanan di Pantai Utara Pulau Jawa dan Madura serta Selat Madura.

Surat Keputusan Menteri Pertanian (SK Mentan) Nomor 607/ Kpts / UM /9 / 1976: Peraturan Ini Berisi Tentng Jalur-Jalur Penangkapan Ikan.

Surat Keputusan Menteri Pertanian (SK Mentan) Nomor 608/ Kpts / UM /9 / 1976: Peraturan Ini Berisi Tentang Penetapan Jalur Penangkapan Bagi Kapal-Kapal Milik Perusahaan Milik Negara.

Surat Keputusan Menteri Pertanian (SK Mentan) Nomor 609/ Kpts / UM /9/ 1976:

Peraturan Ini Berisi Tentang Daerah Penangkapan Kapal *Trawls* Dasar. Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 39 Tahun 1980: Peraturan ini berisi tentang Penghapusan Jaring *Trawls*.

Intstruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1982: Peraturan ini berisi tentang Pelaksanaan Keppres Nomor 39 Tahun 1980.

Surat Keputusan Menteri Pertanian (SK Mentan) Nomor 503/ Kpts / UM /7/ 1980: Peraturan Ini Berisi Tentang Langkah-Langkah Pelaksanaan Penghapusan Jaring *Trawls*.

Surat Keputusan Menteri Pertanian (SK Mentan) Nomor 633/ Kpts / UM /8 / 1980: Peraturan ini berisi tentang petunjuk pelaksanaan SK Mentan Nomor 503/ Kpts / UM /7/ 1980.

Surat Keputusan Menteri Pertanian (SK Mentan) Nomor 694/ Kpts / UM /9/ 1980: Peraturan Ini Berisi Tentang Pembatasan Daerah Penangkapan Ikan Bagi Usaha-USaha Perikanan Yang Menggunakan Alat Tangkap *Trawls*.

Surat Keputusan Menteri Pertanian (SK Mentan) Nomor 542/ Kpts / UM /6/ 1981:

Peraturan Ini Berisi Tentang Penetapan Jumlah Kapal *Trawls* di Daerah Tingkat I di Luar Jawa, Bali Dan Sumatera.

Surat Keputusan Menteri Pertanian (SK Mentan) Nomor 545/ Kpts / UM /8/ 1982:

Peraturan Ini Berisi Tentag Pelaksanaan Intstruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1982.

SKB Mentan, Mendagri Dan Menteri Perdagangan Dan Koperasi Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pengalihan Kapal-Kapal Perikanan Bekas *Trawls*. Keputusan Presiden (Keppres) No.85 Tahun 1982 Tentang Penggunaan Pukat Udang.

Surat Keputusan Menteri Pertanian (SK Mentan) Nomor 930/ Kpts / UM /12/ 1982: Peraturan Ini Berisi Tentang pelaksanaan Keputusan Presiden (Keppres) No.85 Tahun 1982.

Surat Keputusan Menteri Pertanian (SK Mentan) Nomor 769/ Kpts / HK/ 210 / 1988: Peraturan Ini Berisi Tentang Penggunaan Jaring Lempara Dasar.

Surat Keputusan Menteri Pertanian (SK Mentan) Nomor 770/ Kpts / IK/120/ 10/ 96 : Peraturan Ini Berisi Tentang Penggunaan Pukat Ikan di ZEE Indonesia. Surat Keputusan Direktur Jendral Perikanan (SK Dirjen Perikanan) Nomor IK. 010/ S3. 8063/ 82K: Peraturan Ini Berisi Tentang Penyediaan Tempat, Pengelolaan Ikan dan Penampungan Ikan.

Surat Keputusan Direktur Jendral Perikanan (SK Dirjen Perikanan) Nomor IK. 010/ S3. 8075/ 82K: Peraturan Ini Berisi Tentang Konstruksi Pukat Udang Yang di Lengkapi Dengan Alat Pemisah Ikan.

Surat Keputusan Direktur Jendral Perikanan (SK Dirjen Perikanan) Nomor IK. 340/ DJ. 10106/ 97: Peraturan Ini Berisi Petunjuk SK Dirjen Perikanan) Nomor IK. 010/ S3. 8063/ 82K.

#### **D. Dokumen Pemerintah**

Data Agregat kependudukan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019 Semester I: Sumber data, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah.

Daftar Alat Tangkap Ikan Yang Sebelumnya Berlaku Di Wilayah Penangkapan Ikan Kabupaten Tapanuli Tengah Yang Dilarang Melalui Per- Men KP No. 71 Tahun 2016: Sumber data, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Surat Keputusan Alat Tangkap Ikan Yang Boleh Digunakan di Wilayah Penangkapan Ikan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Bidang Penangkapan Perizinan. Sumber data: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah.

### E. Internet

<https://www.cendananews.com/2018/09/perairan-sibolga-dan-tapanuli-tengah-darurat-pemberantasan-pukat-harimau.html/>. Dikutip 2 Februari 2021.

<https://www.mongabay.co.id/2017/05/02/kenapa-alat-tangkap-cantrang-masuk-kelompok-dilarang-di-indonesia/>. Dikutip 1 Februari 2021.

<https://money.kompas.com/read/2020/07/06/145518426/kata-edhy-prabowo-ini-sederet-manfaat-legalkan-alat-tangkap-cantrang?page=all/>. Dikutip 2 Februari 2021

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20151210/99/500235/adopsi-instrumen-perlindungan-internasiobal-bagi-nelayan-kecil-ri-diperlukan/>. Dikutip 2 Februari 2021

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3951590/bpk-larangan-cantrang-bisa-ganggu-ekonomi-sektor-perikanan/>. Dikutip 28 Januari 2021.

Mehulika Sitepu, Pelarangan cantrang: Mengapa pemerintah tak bisa menentukan sikap. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42705861>. Dikutip 28 Maret 2021